

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Bambang Sunggono, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *“Seminar Stabilitas Politik Direktorat Jenderal Khusus”*, Tp: Departemen Dalam Negeri, 1972.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Effendi, *“Penelitian Hukum (Legal Research)”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Fajlurrahman Jurdi, *“Hukum Tata Negara Indonesi”*, Makassar: Praneda Media Group, 2019.
- Fitry Handayani Br Lubis. *“Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa didesa Sei Dua Hulu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan”*, Skripsi ( Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018).
- H.A.W. Widjaja, *“Otonomi Desa Cetakan ke III”*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2013.
- Hikmat M. Mahi, *“Metode Penelitian Dalam Perspektif dan Sastra”*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Adrianto, Ario. *“Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam,”*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Afifudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi:
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2018.
- Fatkhurozi, Muhammad. *“Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari di RSUD Kota Yogyakarta”*.

Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Gunakaya, Widiada. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

#### **B. Jurnal**

Abdul Rahman "Pemakzulan Kepala Negara", Jurnal penelitian syari'ah dan Hukumdiktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017.

Ateng syafirudin "Menuju Penyelenggara Pemerintahan Negara yang bersih dan bertanggung jawab". *Jurnal pro justisia edisi IV*, (Bandung Universitas parahyangan, 2000).

#### **C. SKRIPSI**

Edi Susanto, "*Proses Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 (Studi Didesa Dalam Kecamatan Sakernan Kabupaten Muoro Jambi)*", (Skripsi) Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2008. Iskandar, Khusnan. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Perbandingan Hukum Islam .

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

## E. INTERNET

Adiyah Pratiwi. ST. Dwi, “Kepala Desa Bukan Raja: Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”, *Artikel*, <https://ombudsman.go.id/>, (diakses pada: 16 Juli 2020).

Adiyah Pratiwi. ST. Dwi, “Kepala Desa Bukan Raja: Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa”, *Artikel*, <https://ombudsman.go.id/>, (diakses pada: 16 Juli 2020).

## F. WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Bapak Galih, S.H., M.H. SUBKOR 1 Fasilitas Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Sumber, tentang Kewenangan Kepala Desa didalam Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, Mekanisme dalam Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Dan, mengenai Pemberhentian Perangkat Desa Kepunduan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 dan Apa saja faktor-faktor Pemberhentian Perangkat Desa. Pada Kamis 7 Maret 2024. (wawancara lewat online WastApp).

Hasil Wawancara dengan Ibu Nunung Nur'aeni Kepala Desa. Kepunduan (KUWU) tentang Sejarah Desa. Kepunduan. Pada Jum'at 12 Januari 2024. Wawancara di Desa. Kepunduan.

Hasil Wawancara dengan Bapak Suhedi Sekretaris Kecamatan. Dukupuntang mengenai Rumusan Masalah yang kedua Pemberhentian Perangkat Desa. Kepunduan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 dan Apa saja faktor-faktor Pemberhentian Perangkat Desa. Pada Jum'at 12 Januari 2024. Wawancara di Desa. Kepunduan.

Hail Wawancara dengan Bapak Riszisian Riandi Kesos Kecamatan. Dukupuntang mengenai Peraturan Pemberhentian Perangkat Desa. Pada Jum'at 12 Januari 2024. Wawancara di Desa. Kepunduan.